

PERAN KOMITE SEKOLAH TERHADAP PENERAPAN KURIKULUM

Syamsuddin

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar

Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Makassar

Email: syamsuddinsasak@yahoo.co.id

Abstract:

The educational curriculum is a tool and basic tool within a system of education, which can lead to the achievement of expected educational goals. The curriculum contains a number of subjects that are expected to be mastered by learners and encompasses the entire learning experience. School curriculum implementation in schools many factors that can influence it. One is the existence of a school committee consisting of members of the community and the board of teachers. School committees can provide consideration, support, control and liaison for the implementation of educational curriculum in schools to achieve the expected educational objectives.

Keywords: Curriculum; school committee

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Mulai yang paling rendah sampai kepada persoalan-persoalan yang rumit. Misalnya peran masyarakat dalam mengembangkan pendidikan disekolah. Hubungan antara pihak sekolah dan orang tua peserta didik yang kadang saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya sehingga kadang melahirkan kesalah pahaman. Mereka selalu menyerahkan masalah pendidikan anak mereka kepada pihak sekolah tanpa adanya campur tangan dari mereka sendiri. Terkadang mereka pun seakan enggan untuk diajak membahas mengenai perkembangan anak mereka di sekolah. Seharusnya para orang tua tidak boleh lepas tangan begitu saja terhadap sekolah. Keluarga merupakan yang paling pertama dan utama dalam mendidik anak. Karena seperti yang kita ketahui, sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang kedua setelah keluarga.

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan formal yang pertama dan yang paling utama dalam proses sosialisasi anak. Selain itu juga sekolah yang merupakan lingkungan pendidikan formal, memegang peranan penting dalam sosialisasi anak. Untuk itu kedua lingkungan pendidikan ini, baik formal maupun informal tidak dapat berdiri sendiri dan harus terintegrasi dengan melakukan hubungan kerja sama yang baik antara pihak sekolah dan orang tua. Agar tidak terjadi kesalah pahaman (Mustari, 2014: 151-152).

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) dinyatakan

adanya perintisan pembentukan dewan sekolah di setiap kabupaten dan kota, dan pembentukan komite sekolah di setiap sekolah (Idris, 2014: 161-162).

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 44 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dirumuskan sebagai berikut:

Dewan pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten dan kota dewan pendidikan berperan sebagai: 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, 2) Pendukung (*supporting agency*) baik berupa finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, 4) Mediator antara pemerintah dan DPR dengan masyarakat. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Peran komite sekolah hampir sama dengan dewan pendidikan, namun ruang lingkupnya lebih sempit di satuan pendidikan (Idris, 2014: 161-162).

Sebagai badan pertimbangan, komite mempunyai tiga fungsi yaitu memberikan pertimbangan dalam perencanaan sekolah, pelaksanaan program pendidikan, dan pengelolaan sumber daya pendidikan. Terkait ketiga fungsi tersebut komite sekolah berperan dalam mengidentifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat, memberikan masukan RAPBS. Komite sekolah memberikan pertimbangan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah dan memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru-guru. Untuk pengadaan sumber daya komite sekolah berperan dalam memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah dan memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diadakan di sekolah.

Sebagai badan pendukung, komite berperan dalam memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah, koordinasi dukungan sarana dan prasarana di sekolah, memantau kondisi anggaran di sekolah, dan komite sekolah memberikan dukungan dalam peningkatan prestasi belajar peserta didik dan kinerja sekolah. Komite sekolah sebagai badan pendukung mempunyai tiga fungsi yaitu memberikan dukungan dalam pengelolaan sumber daya sekolah, pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, dan pengelolaan anggaran sekolah.

Sebagai badan pengontrol, komite melakukan perannya dalam menyetujui dan memantau kegiatan penggalangan dana untuk sekolah, membantu dalam sistem monitoring dan evaluasi standar di sekolah, dan memantau pelaksanaan rekomendasi dalam laporan kinerja sekolah.

Sebagai badan pengontrol komite juga berperan dalam memantau kinerja sekolah, seperti nilai ujian, kehadiran guru dan peserta didik, dan memeriksa

laporan keuangan bulanan. Komite sekolah melakukan pengontrolan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan minimal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan dari satuan pendidikan.

Sebagai badan penghubung, komite sekolah berperan dalam mengidentifikasi aspirasi pendidikan dalam masyarakat, menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program pendidikan, mengomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap instansi terkait dalam bidang pendidikan di sekolah. Komite sekolah sebagai badan penghubung mempunyai tiga fungsi yaitu menjadi penghubung antara masyarakat dengan sekolah dalam perencanaan pendidikan, pelaksanaan program sekolah, dan pengelolaan sumber daya pendidikan (Hasbullah, 2010: 96-99).

Sedangkan untuk memenuhi amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 38 ayat 2 tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum dirumuskan sebagai berikut;

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah (Republik Indonesia, 2008: 203).

Salah satu aspek yang mendasari terwujudnya keberhasilan pendidikan nasional adalah dari segi aspek kurikulum. Kurikulum memegang peranan yang terdepan dalam mewujudkan sekolah yang bermutu (Rusman, 2000: 1). Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 36 ayat 2 disebutkan bahwa:

Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik (Rusman, 2000: 1).

Juga adanya Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (MPMBM), telah memberi peluang kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan aspirasi seluruh warga sekolah maupun luar sekolah dalam hal ini masyarakat secara maksimal dengan tujuan akhir pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan di satuan pendidikan.

Melalui Kurikulum Madrasah tersebut diharapkan pelaksanaan program-program pendidikan di Madrasah dapat berjalan sesuai dengan karakteristik potensi, dan kebutuhan peserta didik. Untuk itu, mulai penyusunan hingga penerapannya perlu melibatkan seluruh warga madrasah (Kepala Madrasah, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik) dan pemangku kepentingan lain (Komite Madrasah, Orang Tua Peserta Didik, Masyarakat, dan Lembaga-lembaga lain).

Untuk itu komite sekolah sebagai salah satu komponen bagi terselenggaranya pendidikan di sekolah, memiliki peran yang sangat menentukan terhadap keberhasilan penerapan kurikulum. Dengan perannya sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), dan mediator antara pemerintah dan DPR dengan masyarakat. Jadi peran aktif komite sekolah terhadap penerapan kurikulum sangat dibutuhkan guna menciptakan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik potensi dan kebutuhan peserta didik.

Pada satuan pendidikan, menyusun dan menerapkan Kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Acuan yang digunakan meliputi: standar isi, standar kompetensi lulusan dan panduan penyusunan Kurikulum dari Badan Standar Nasional Pendidikan. Adapun pengimplementasikan manajemen kurikulum mengacu pada kurikulum yang diberlakukan.

Berdasarkan teori di atas apabila dikaitkan dengan kondisi yang terjadi di setiap sekolah khususnya dalam hal peranan komite sekolah terhadap penerapan kurikulum. Peranan komite lebih dominan terhadap perannya sebagai badan pendukung serta pemberi pertimbangan sebagai badan penghubung dan badan pengontrol.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Peran Komite Sekolah

Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Idris, 2014: 161-162).

Terbentuknya komite sekolah sebagai perangkat yang ikut serta dan bertanggung jawab terhadap kepentingan setiap sekolah. Tanggung jawab yang dimaksud adalah untuk membantu sekolah mencari jalan keluar terhadap apa saja yang dihadapi sekolah (Siaahan, 2000: 75). Keputusan menteri pendidikan nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang pembentukan komite sekolah, menjelaskan bahwa acuan pembentukan komite sekolah adalah

Merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan pendidikan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah (Siaahan, 2000: 75).

Komite sekolah adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menentukan visi, misi dan tujuan dari sekolah, menetapkan dan memantau anggaran operasional tahunan, menggunakan, mengelola dan mengevaluasi, dan menentukan serta mengkaji kebijakan dan praktik untuk mendukung prestasi peserta didik.

Komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Pembentukan komite sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada (Wahyu, 2000: 3). Dengan begitu komite akan dapat melaksanakan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi dan permasalahan lingkungan masing-masing sekolah. Adnya sinergi antara komite sekolah dan sekolah menyebabkan lahirnya tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan aspirasi, ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya (Hasbullah, 2010: 95).

Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa komite sekolah adalah badan yang anggota-anggotanya diambil dari lingkungan masyarakat dan sekolah yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Dan memiliki kontribusi yang besar terhadap jalannya proses pendidikan dengan perannya sebagai, badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol, dan badan penghubung dari pemerintah dan masyarakat.

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Komite ini berkedudukan di satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya. Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan pemerintah (Danim, 2012: 48-49).

Maka dapat disimpulkan bahwa peran komite sekolah adalah tindakan yang dilakukan oleh lembaga komite sekolah mewadahi peran serta masyarakat mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Komite sekolah dibentuk dengan tujuan yang esensial seperti berikut:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu disatuan pendidikan (Danim, 2012: 49).

Sejalan dengan tujuan pembentukannya, komite sekolah memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Badan Pertimbangan

Komite sekolah sebagai badan pertimbangan berperan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan ditingkat satuan pendidikan, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sekolah. Komite sekolah sebagai badan pertimbangan mempunyai tiga fungsi yaitu memberikan pertimbangan dalam perencanaan sekolah, pelaksanaan program pendidikan, dan pengelolaan sumber daya pendidikan.

2. Badan Pendukung

Komite sekolah sebagai badan pendukung berperan dalam memberikan dukungan terhadap sekolah dapat bewujud finansial, pemikiran, atau tenaga dalam penyelenggaraan, minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Komite sekolah berperan dalam memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.

3. Badan Pengontrol

Komite sekolah sebagai badan pengontrol melakukan perannya dalam menyetujui dan memantau kegiatan penggalangan dana untuk sekolah, membantu dalam sistem monitoring dan evaluasi standar di sekolah, dan memantau pelaksanaan rekomendasi dalam laporan kinerja sekolah. Komite sekolah sebagai badan pengontrol mempunyai tiga fungsi yaitu mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah, memantau pelaksanaan program sekolah, dan memantau output pendidikan.

4. Badan Penghubung

Komite sekolah sebagai badan penghubung berperan dalam membantu pertemuan antara wali peserta didik dengan guru dan mengadakan pertemuan antara wali peserta didik dengan guru dan mengadakan pertemuan rutin setiap bulan dengan semua anggota komite sekolah. Komite sekolah sebagai badan penghubung mempunyai tiga fungsi yaitu menjadi penghubung antara masyarakat dengan sekolah dalam perencanaan pendidikan, pelaksanaan program sekolah, dan pengelolaan sumber daya pendidikan (Wahyu, 2000: 3).

Sejalan dengan perannya itu, komite sekolah memiliki beberapa fungsi strategis dan operasional tingkat sekolah. *Pertama*, mendorong timbulnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. *Kedua*, melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. *Ketiga*, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. *Keempat*, memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pemerintah, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS), kriteria

kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. *Kelima* mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. *Keenam*, menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. *Ketujuh*, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Adapun keanggotaan komite sekolah disajikan sebagai berikut:

1. Unsur masyarakat dapat berasal dari:
 - a. Orang tua/wali peserta didik
 - b. Tokoh masyarakat
 - c. Dunia usaha/industri
 - d. Organisasi profesi tenaga pendidikan
 - e. Wakil alumni
 - f. Wakil peserta didik
2. Unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggaraan pendidikan, badan pertimbangan desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota komite sekolah (maksimal 3 orang)
3. Anggota komite sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilang) orang dan jumlahnya gasal (Danim, 2012: 50).

Penerapan Kurikulum

Pengertian kurikulum

Kurikulum berasal dari bahasa latin yang berarti “jalur pacu” dan secara tradisional, kurikulum sekolah disajikan seperti itu (ibarat jalan) bagi kebanyakan orang (Hasibuan, 2014: 2). Lebih lanjut Zais mengemukakan berbagai pengertian kurikulum , yakni: (1) kurikulum sebagai program pelajaran, (2) kurikulum sebagai isi pelajaran, (3) kurikulum sebagai pengalaman belajar yang direncanakan, (4) kurikulum sebagai pengalaman di bawah tanggung jawab sekolah dan kurikulum dan kurikulum sebagai rencana tertulis untuk dilaksanakan. Kurikulum merupakan suatu alat pendidikan. Kurikulum merupakan salah satu unsur pokok dalam satu sistem pendidikan bahkan kurikulum itulah yang merupakan salah satu alat yang akan membawa kepada tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan (Ismawati, 2012: 2).

Berdasarkan pengertian di atas, dalam kurikulum terkandung dua hal pokok, yaitu: (1) adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik, dan (2) tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh ijazah. Dengan demikian, implikasinya terhadap praktik pengajaran, yaitu peserta didik harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan dan menempatkan guru dalam posisi yang sangat penting dan menentukan. Keberhasilan siswa ditentukan oleh seberapa jauh mata pelajaran tersebut dikuasainya dan biasanya disimbolkan dengan skor yang diperoleh setelah mengikuti suatu tes atau ujian.

Pengertian kurikulum seperti disebutkan di atas dianggap terlalu sempit atau sangat sederhana. Jika kita mempelajari buku-buku atau literatur lainnya tentang kurikulum-terutama yang berkembang di negara-negara maju- maka akan ditemukan banyak pengertian yang lebih luas yang beragam. Istilah kurikulum pada dasarnya tidak hanya terbatas pada sejumlah mata pelajaran saja, tetapi mencakup semua pengalaman belajar (*learning experiences*) yang dialami siswa dan memengaruhi perkembangan pribadinya. Bahkan Harold B. Alpert yang dikutip oleh tim MKD memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada peserta didik di bawah tanggung jawab sekolah (*all of the activities that are provided for the students by the school*). Sehingga kurikulum tidak dibatasi pada kegiatan di dalam kelas, tetapi mencakup juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar kelas.

Pendapat senada dan menguatkan pendapat pengertian tersebut dikemukakan oleh Sailor, Alexander, dan Lewis yang dikutip oleh tim pengembang MKDP yang menganggap kurikulum sebagai segala upaya sekolah untuk memengaruhi peserta didik supaya belajar, baik dalam ruangan kelas, di halaman sekolah. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengumpulan informasi tentang kata kurikulum tahun 1916-1982 diperoleh beberapa pernyataan yang dapat dikembangkan sebagai definisi dari kurikulum (Tim pengembang MKDP, 2016: 2-5).

H.A.R. Tilaar definisi kurikulum adalah keseluruhan program, fasilitas, dan kegiatan suatu lembaga pendidikan atau pelatihan untuk mewujudkan visi misi lembaganya (Tilaar, 2000: 177).

Dari beberapa definisi kurikulum di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kurikulum adalah seluruh usaha sekolah untuk merangsang anak belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagai acuan bagi sekolah dalam menyelenggarakan proses pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai.

Konsep Kurikulum

Konsep terpenting yang perlu mendapat penjelasan dalam teori kurikulum adalah konsep kurikulum sebagai substansi. Ada tiga konsep tentang kurikulum, Kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi.

Konsep pertama. Adalah kurikulum sebagai substansi, suatu kurikulum, dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat menunjuk pada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar-mengajar, jadwal, dan evaluasi. Suatu kurikulum juga dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan masyarakat.

Konsep kedua. Adalah kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem

persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat, suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia, dan prosedur kerja bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis.

Konsep ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi yaitu bidang studi kurikulum. Ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum. Melalui studi kepustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan, mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum (Sukmadinata, 2013: 27).

Fungsi Kurikulum

Ada beberapa dari penerapan kurikulum adalah sebagai berikut:

1. Fungsi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan

Menurut Soetopo dan Soemanto yang dikutip Abdullah Idi bahwa kurikulum suatu sekolah merupakan suatu alat atau usaha mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan sekolah tertentu yang dianggap cukup tepat untuk dicapai, sehingga suatu langkah yang tepat untuk dilakukan adalah meninjau kembali tujuan yang selama ini digunakan oleh sekolah yang bersangkutan.

2. Fungsi kurikulum bagi peserta didik

Dalam pandangan pendidikan Islam, pendidikan mesti diorientasikan kepada kepentingan peserta didik dan perlu diberi bekal pengetahuan untuk hidup pada zamannya kelak. Kurikulum diharapkan mampu menawarkan program pada peserta didik yang hidup pada zamannya, dengan latar belakang sosio historis dan kultural yang berbeda dengan zaman dimana kedua orang tuanya hidup.

3. Fungsi kurikulum bagi pendidik

Fungsi kurikulum bagi pendidik yaitu, sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisasi pengalaman belajar para peserta didik, dan sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan (Ismawati, 2012: 7).

4. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah

Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah yaitu, sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi dalam menciptakan situasi untuk menunjang hasil belajar peserta didik kearah lebih baik, sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi dalam memberikan bantuan kepada pendidik agar dapat memperbaiki situasi mengajar, dan sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi atas kemajuan hasil belajar mengajar.

5. Fungsi kurikulum bagi orang tua

Kurikulum difungsikan sebagai bentuk adanya partisipasi orang tua dalam membantu usaha sekolah dalam memajukan peserta didik. Bantuan tersebut dapat berupa konsultasi langsung dengan sekolah mengenai masalah mengenai anak-anak mereka. Bantuan berupa materi dari orang tua peserta didik. Dengan membaca dan memahami kurikulum sekolah, para orang tua peserta didik dapat mengetahui pengalaman yang diperlukan anak-anak mereka, sehingga partisipasi orang tua sangat urgen dalam menyelesaikan proses belajar mengajar di sekolah.

6. Fungsi bagi masyarakat dan pemakai lulusan

Dengan mengetahui kurikulum suatu sekolah, masyarakat sebagai pemakai lulusan masyarakat dapat ikut serta memberikan kontribusi dalam memperlancar pelaksanaan program pendidikan yang membutuhkan kerja sama dengan pihak orang tua dan masyarakat, dan ikut memberikan kritik dan saran konstruktif demi penyempurnaan program pendidikan di sekolah, agar lebih serasi dengan kebutuhan masyarakat dan lapangan kerja (Idi, 2007: 179-183).

Implementasi Kurikulum

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa pengembangan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Dalam *oxford Advance learner's Dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah "*put something into effect*" atau penerapan suatu yang memberikan efek. Implementasi kurikulum juga dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis (*written curriculum*) dalam bentuk pembelajaran. Ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Miller dan Seller dalam buku Oemar Hamalik, bahwa "*In some case, implementation has been identified with instruction*". Lebih lanjut dijelaskan bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu penerapan konsep, ide, program atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau berbagai aktivitas baru, sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah.

Dengan demikian implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya. Implementasi ini juga sekaligus merupakan penelitian lapangan (*field research*) untuk keperluan validasi sistem kurikulum itu sendiri (Hamalik, 2013: 237).

Tahap-tahap Penerapan Kurikulum

Tahapan penerapan kurikulum di sekolah meliputi: (a) Perencanaan, (b) Pengorganisasian dan koordinasi, (c) Implementasi, (d) pengendalian.

a. Tahap perencanaan

Pada tahap ini kurikulum dijabarkan sampai menjadi rencana pengajaran (RP). Untuk itu perlu dilakukan tahapan sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan GDPP menjadi Analisis Mata Pelajaran (AMP). Yang paling pokok esensial atau biasanya yang sukar dipahami oleh siswa. Pokok bahasan semacam ini diprioritaskan untuk dibahas secara tatap muka kelas/laboratorium. Pokok bahasan yang kurang esensial atau mudah dipahami oleh siswa dapat dijadikan tugas/pekerjaan rumah.
- 2) Berdasarkan kalender pendidikan dari dinas pendidikan, sekolah harus menghitung hari kerja efektif dan pelajaran efektif untuk setiap mata pelajaran, menghitung hari libur, hari untuk ulangan dan hari-hari tidak efektif.
- 3) Menyusun Program tahunan (Prota). Dalam mengisi prota yang penting adalah membandingkan jumlah jam efektif dengan alokasi waktu tatap muka dalam Format AMP. Jika ternyata jam efektif lebih sedikit dibanding alokasi waktu tatap muka, maka harus dirancang tambahan jam pelajaran atau pokok bahasan yang dijadikan tugas.
- 4) Menyusun Program Catur Wulan (Proca). Sebenarnya penyusunan proca tidak beda jauh dengan penyusunan prota. Yang pokok untuk diperhatikan, pada proca sudah harus semakin jelas bagaimana pokok bahasan dalam catur wulan diselesaikan, termasuk kapan harus diajarkan, baik melalui kegiatan tatap muka maupun tugas pekerjaan rumah
- 5) Program Satuan Pelajaran (PSP). Dalam menyusun PSP guru sudah memasukkan secara jelas kegiatan untuk setiap subpokok bahasan termasuk bagaimana tes formatif dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran.
- 6) Rencana Pengajaran (RP). RP merupakan rincian PSP untuk satu kali tatap muka. Yang penting pada RP harus terdapat catatan kemajuan siswa setelah mengikuti pelajaran. Catatan tersebut dipakai sebagai dasar pelaksanaan RP berikutnya (Mustari, 2014: 83).

b. Tahap Pengorganisasian dan Koordinasi

Salah satu aspek yang perlu dipahami dalam pengembangan kurikulum adalah aspek yang berkaitan dengan organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan suatu pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa untuk mempelajari pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pelajaran dapat dicapai secara efektif. Tujuan pendidikan yang dirumuskan dapat memengaruhi pola atau desain kurikulum karena tujuan tersebut dapat menentukan pola atau kerangka untuk memilih, merencanakan, dan melaksanakan segala pengalaman dan kegiatan belajar di sekolah.

Organisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pelajaran yang ada dalam kurikulum, sedangkan yang menjadi sumber bahan pelajaran

dalam kurikulum adalah nilai budayah, aspek siswa dan masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Harus ada beberapa paktor yang harus di pertimbangkan dalm organisasi kurikulum, diantaranya berkaitan dengan ruang lingkup atau (*scop*), urutan bahan (*sequence*), kontinuitas, keseimbangan dan keterpaduan (*integrated*) (Rusman, 2000: 60).

c. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini merupakan tahap yang paling menentukan apakah sekolah di bawah kepemimpinan kepala sekolah dapat mewujudkan program sekolah atau tidak. Perencanaan pengorganisasian dan kordinasi yang telah disusun akan berjalan secara efektif apabila guru dan kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam upaya meningkatkan mutu pelajaran. Mutu pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik apabila guru dan kepala sekolah sama-sama untuk membuka diri terhadap masukan dan kritikan yang membangun. Sebagai guru harus siap diberi masukan oleh kepala sekolah berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Begitu pun kepala sekolah harus memiliki jadwal yang jelas dan rinci untuk melakukan suvervisi terhadap kinerja guru.

d. Tahap Evaluasi dan Pengendalian

Pelaksanaan pembelajaran berjalan secara efektif atau tidak dapat diketahui melalui kegiatan evaluasi. Evaluasi ini penting dilakukan secara benar kerna bertujuan untu mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang telah dilakukan berjalan atau tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Guru perlu menetapkan jenis evaluasi apa yang digunakan dan hasil evaluasi diharapkan akan memiliki pengaruh dan dampak terhadap perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran selanjutnya. Dengan dilaksanakannya evaluasi ini akan memberikan dampak dan manfaat bagi guru dan peserta didik untuk peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Disamping itu evaluasi yang dilakukan oleh guru dapat menjadi masukan untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi peserta didik (Idris, 2014: 30).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komite sekolah sebagai perangkat yang ikut serta dan bertanggung jawab terhadap kepentingan setiap sekolah. Tanggung jawab yang dimaksud adalah untuk membantu sekolah mencari jalan keluar terhadap apa saja yang dihadapi sekolah.
2. Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan pendidikan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

3. Pelaksanaan kurikulum di sekolah tidak terlepas dari dukungan komite sekolah. Minimal dalam persoalan-persoalan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan, *Otonomi Manajemen Sekolah*, (Cet 2; Bandung: Alfabeta cv, 2012
- Hamalik, Oemar, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2013
- Hasbullah, *Otonomi pendidikan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010
- Idi, Abdullah, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, Cet, 1; Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2007
- Idris, Ridwan, *Manajemen Pendidikan dalam Aplikasinya di Sekolah*, Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014
- Ismawati, Esti, *Telaah Kurikulum dan Pengembangan Bahan Ajar*, Yogyakarta, Ombak, 2012.
- M., Hasibuan, *Manajemen Dasar, pengertian dan Masalah*, Cet. 10; Jakarta, Bumi aksara, 2014
- Mustari, Mohammad, *Manajemen Pendidikan*, Cet.1; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014
- Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 3; Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publising, 2008
- Rusman, *Manajemen Kurikulum*, Cet. III: Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000.
- Siahaan, Amiruddin. *Manajemen pengawas pendidikan*, Cet, I; Ciputat: Ciputat Pres Group
- Sukmadinata, Nana Syaodhi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2013
- Tilaar, H.A.R., *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Cet, 1, Jakarta: Rineka Cipta 2000.
- Tim pengembang MKDP, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2016.
- Wahyu, Mulyono Dwi, *Peran Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jurnal Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2000.